

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka. (Sukirno, 1997).

Menurut Boediono (1985), pertumbuhan ekonomi juga didefinisikan sebagai proses kenaikan *output* per kapita dalam jangka panjang. Persentase pertambahan output itu harus lebih tinggi dari persentase pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Sedangkan menurut Tambunan (1996), pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan seluruh ekonomi negara Indonesia. Kemiskinan yang berlangsung terus di banyak negara di Afrika merupakan salah satu contoh dari akibat tidak adanya pertumbuhan ekonomi di negara-negara tersebut (stagnasi). Oleh karena itu, masalah pertumbuhan ekonomi telah menjadi perhatian ekonom, baik dari negara-negara yang sedang berkembang maupun negara-negara industri maju.

Teori pertumbuhan menurut ahli-ahli ekonomi klasik, ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, dan tingkat teknologi yang digunakan. Mereka lebih memfokuskan perhatian pada pengaruh pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Misalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Menurut pandangan dari teori Schumpeter, menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggikan efisiensi dalam memproduksi suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi perusahaan dengan tujuan mempertinggi efisiensinya.

Todaro (2000) mengatakan Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa. Ketiga faktor tersebut adalah :

1. Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
2. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
3. Kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi jika sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Sehingga dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) yang pada akhirnya akan diinvestasikan lagi dalam bentuk pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku. Sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan output di masa yang akan datang. Pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah

angkatan kerja, yang terjadi beberapa tahun kemudian secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang besar akan menambah jumlah tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Kemajuan teknologi dapat meningkatkan modal dan tenaga kerja. Dimana peningkatan tenaga kerja terjadi jika penerapan teknologi tersebut mampu meningkatkan mutu atau keterampilan kerja secara umum. Sedangkan kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi memungkinkan pemanfaatan barang modal secara lebih produktif.

Pertumbuhan ekonomi regional didekati dengan hipotesa konvergensi, yang terbagi atas dua hal yaitu *absolute convergence* berdasarkan teori pertumbuhan neoklasik dan *conditional convergence* yang berdasarkan pada teori pertumbuhan endogenous. Kedua hipotesa konvergensi diatas termasuk dalam analisa dinamis. *Absolute convergence* diartikan sebagai konvergensi yang terjadi pada daerah dalam suatu negara, yang walaupun terjadi perbedaan dalam teknologi, preferensi dan intuisi antar daerah, namun perbedaan itu relative lebih kecil dibanding dengan perbedaan antar negara (bersifat lebih homogenitas).

Hipotesis konvergensi absolut ini sulit diterima kerana dalam kenyataan pertumbuhan ekonomi regional hanya dipengaruhi oleh tingkat pendapatan per kapita awal saja. Bila kita melakukan hal ini, model akan rawan terhadap bias spesifikasi. Konvergensi kondisional adalah konvergensi yang dilakukan dengan melihat perilaku dan karakteristik antar negara atau antar daerah dalam suatu negara. Dengan melakukan tes hipotesis konvergensi kondisional maka akan mendapatkan manfaat yang lebih besar, yaitu dapat mengetahui faktor-faktor penentu apa saja yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional dalam jangka panjang dengan cara memasukkan variabel-variabel terpilih yang dianggap mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi regional kedalam persamaan. Konvergensi dikatakan kondisional apabila tingkat pertumbuhan lebih tinggi pada proporsi yang memiliki level pendapatan yang lebih rendah. (Wibisono,2003).

Menurut Dornbusch dan Fisher (2008), masalah konvergensi berpusat pada apakah perekonomian-perekonomian dengan tingkat output awal yang berbeda akan tumbuh ke standar hidup yang sama. Teori pertumbuhan neoklasik memprediksi konvergensi absolut (*absolute convergence*) bagi perekonomian dengan tingkat tabungan dan pertumbuhan populasi yang sama dan dengan akses kepada teknologi yang sama. Dengan kata lain, mereka semua akan mencapai pendapatan *steady state* yang sama. Konvergensi kondisional (*conditional convergence*) diprediksi bagi perekonomian dengan tingkat tabungan dan pertumbuhan populasi yang berbeda. Sehingga pendapatan *steady state* akan berbeda.

Menurut Sukirno (1997), faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, dan luas pasar sebagai sumber pertumbuhan.

2.2 DISPARITAS (KESENJANGAN) ANTAR WILAYAH

Menurut Arsyad (1997), penghapusan kemiskinan dan berkembangnya ketidakmerataan distribusi pendapatan merupakan inti permasalahan pembangunan. Walaupun titik perhatian utama kita pada ketidakmerataan distribusi pendapatan dan harta kekayaan, namun hal tersebut hanyalah merupakan sebagian kecil dari masalah ketidakmerataan yang lebih luas di negara sedang berkembang. Misalnya ketidakmerataan kekuasaan, prestise, status, kepuasan kerja, kondisi kerja, tingkat partisipasi, dan kebebasan untuk memilih. Uppal dkk, (1986), mengatakan bahwa penurunan kesenjangan antar daerah dapat disebabkan karena adanya alokasi dana pembangunan, antar lain seperti misalnya transfer pemerintah pusat melalui berbagai grant dan pengeluaran pemerintah pusat di masing-masing provinsi melalui daftar isian proyek (DIP).

Pendiri ilmu ekonomi klasik, Adam Smith dan David Ricardo (dalam Lipsey,1985), sangat memperhatikan distribusi pendapatan di antara tiga kelas

sosial yang besar yaitu pekerja, pemilik modal, dan pemilik tanah. Untuk mengatasi persoalan ini mereka menentukan tiga faktor produksi : tenaga kerja, modal, dan tanah. Balas jasa untuk setiap faktor produksi ini merupakan pendapatan bagi tiga kelas dalam masyarakat. Smith dan Ricardo tertarik pada apa yang menentukan pendapatan masing-masing kelompok dari pendapatan nasional, dan bagaimana suatu pertumbuhan dalam pendapatan nasional mempengaruhi distribusi pendapatan ini. Teori ini meramalkan bahwa kalau masyarakat mengalami perkembangan tuan tanah akan menjadi makmur dan kapitalis akan menjadi semakin melarat.

Menurut Irma Adelman dan Cynthia morris (1973) dalam Arsyad (1997) mengemukakan 8 sebab yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara sedang berkembang, yaitu :

1. Pertambahan penduduk yang tinggi yang akan mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita.
2. Inflasi dimana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang.
3. Ketidak merataan pembangunan antar daerah.
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek padat modal, akibatnya pengangguran akan bertambah.
5. Rendahnya mobilitas sosial.
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga barang hasil industri, dimana untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis.
7. Memburuknya nilai tukar dari negara sedang berkembang dengan perdagangan dengan negara maju. Sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang-barang ekspor negara sedang berkembang.
8. Hancurnya industri kerajinan rakyat seperti petukangan.

Disparitas antar wilayah adalah perbedaan tingkat PDB per kapita yang dapat diakibatkan pertumbuhan yang berbeda antar wilayah. Setiap negara selalu mempunyai wilayah yang maju secara ekonomi dan ada pula yang tertinggal. Perbedaan ini terletak pada perkembangan sektor-sektor ekonominya, baik sektor pertanian, pertambangan, industri, konstruksi, perdagangan, transportasi, komunikasi, sektor jasa seperti perbankan, asuransi, kesehatan, maupun sektor infrastruktur, perumahan dan lain sebagainya. Pembangunan wilayah yang merata tidak berarti setiap wilayah mempunyai tingkat pertumbuhan atau perkembangan yang sama, atau mempunyai pola pertumbuhan yang seragam untuk setiap wilayah. Pengertian pembangunan wilayah yang merata mengarah kepada pengembangan potensi wilayah secara menyeluruh sesuai kapasitas dan potensi yang dimiliki, sehingga dampak positif dari pertumbuhan ekonomi terbagi secara seimbang kepada seluruh wilayah atau daerah. Pada dasarnya tujuan akhir dari pembangunan wilayah yang seimbang adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk di wilayah pedesaan/daerah belakang sehingga taraf hidupnya sejajar atau setara dengan taraf hidup penduduk di wilayah perkotaan/maju melalui pembangunan sektor pertanian, industri, perdagangan atau bisnis, fasilitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. (Alam, 2006).

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi regional antar daerah di Indonesia adalah (Yadiansyah, 2007), yang pertama konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah. Di Indonesia pertumbuhan ekonomi nasional yang diterapkan pemerintah secara langsung maupun tidak langsung terpusat di pulau jawa, sehingga membuat terbelakangnya pembangunan ekonomi provinsi diluar jawa, khususnya Indonesia Bagian Timur. Kedua, alokasi investasi. Pola distribusi nilai tambah industri antar daerah adalah distribusi investasi langsung, baik yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun dalam negeri (PMDN). Terpusatnya investasi di pulau jawa atau terhambatnya perkembangan investasi daerah disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kebijakan dari birokrasi yang terpusat sampai pada keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di luar jawa (Tambunan, 1996). Ketiga adalah tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah antar pulau. Kurang lancarnya mobilitas faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal antar daerah.

Keempat yaitu perbedaan sumber daya. Dasar pemikiran "klasik" sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya SDAny akan lebih maju masyarakatnya dan lebih makmur dibandingkan daerah yang miskin. Selain itu dibutuhkan faktor-faktor lain yaitu teknologi dan sumber daya manusia untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Daerah-daerah di Indonesia yang kaya sumber daya alam seperti NAD, Riau, Kalimantan, dan Papua memang masih lebih baik di banding daerah diluar jawa yang miskin SDA, tetapi tingkat pendapatan di daerah-daerah kaya tersebut tidak lebih tinggi dibanding daerah di Jawa yang relatif kaya SDM dan teknologi. Kelima adalah perbedaan kondisi demografis antar daerah. Terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan penduduk, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat dan etos kerja. Terakhir adalah kurang lancarnya perdagangan antar daerah. Ketidاكلانaran ini disebabkan terutama oleh keterbatasan transportasi dan komunikasi, perdagangan antar provinsi meliputi barang jadi, barang modal, input antara, barang baku, dan material-material lainnya untuk produksi dan jasa jadi terganggu.

Ray (1998), mengatakan bahwa ketimpangan ekonomi merupakan dasar dari disparitas individu yang memperbolehkan untuk memiliki sesuatu barang, pada saat individu-individu yang lain memilih sesuatu yang persis sama. Disparitas pendapatan dan kekayaan seseorang dalam banyak situasi berhubungan dengan isu-isu pendapatan dan kebebasan dalam berpolitik. Menurut Wie (1983), bahwa masalah ketimpangan dalam pembagian pendapatan dapat dilihat dari tiga segi, yaitu pembagian pendapatan antar golongan pendapatan atau ketimpangan relatif, pembagian pendapatan antar daerah perkotaan dan pedesaan, dan pembagian pendapatan antar daerah. Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan bisa kita lihat dari segi perbedaan pendapatan antar daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Bisa dilihat dari dua indikator, yang pertama perbandingan antara tingkat pendapatan perkapita di daerah perkotaan dan pedesaan. Kedua, disparitas dilihat dari pendapatan daerah perkotaan dan pedesaan (perbedaan dalam pendapatan rata-rata antara kedua daerah sebagai persentase dari pendapatan nasional rata-rata). Ketimpangan dalam pembagian pendapatan antar daerah adalah ketimpangan dalam perkembangan

ekonomi antara berbagai daerah di Indonesia, yang menyebabkan pula ketimpangan dalam tingkat pendapatan perkapita antar daerah.

World Bank (2005) mendeskripsikan bahwa kesetaraan sebagai kondisi dimana setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengejar kehidupan yang mereka pilih dan terhindar dari hal-hal yang merugikan. Antara kesejahteraan dan kesetaraan mempunyai sifat yang saling melengkapi yang muncul karena dua alasan dasar yaitu karena banyak kegagalan pasar di negara-negara sedang berkembang khususnya dalam pasar kredit, asuransi, tanah dan modal manusia, yang kedua adalah fakta bahwa ketidaksetaraan ekonomi dan politik yang tinggi cenderung mendorong pada penciptaan berbagai institusi yang secara sistematis memihak kepada kepentingan kalangan yang memiliki pengaruh besar.

Selain itu, menurut Bank Dunia dalam Susanti (1995), mempunyai kriteria sendiri untuk mengukur distribusi pendapatan suatu negara atau daerah yaitu berdasarkan kontribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk. Kriteria itu adalah:

- a. Bila kelompok 40% penduduk termiskin atau rendah, dimana pengeluarannya lebih kecil daripada 12% dari keseluruhan pengeluaran, maka dikatakan bahwa daerah atau negara yang bersangkutan berada dalam tingkat ketimpangan tinggi.
- b. Bila kelompok 40% penduduk termiskin atau rendah, pengeluaran antara 12%-17% dari keseluruhan pengeluaran, maka dikatakan bahwa daerah atau negara yang bersangkutan berada dalam tingkat ketimpangan sedang (moderat).
- c. Bila kelompok 40% penduduk termiskin atau rendah, pengeluarannya lebih dari 17% dari keseluruhan pengeluaran, maka dikatakan bahwa daerah atau negara yang bersangkutan berada dalam tingkat ketimpangan rendah.

Ada sejumlah indikator yang digunakan untuk menganalisis “*development gap*” atau “disparitas” antar kabupaten/ kota, provinsi, atau negara, yaitu : (Tambunan, 2001)

- a. Distribusi PDRB menurut provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Konsumsi rumah tangga per kapita.
Asumsi yang digunakan untuk menganalisa konsumsi rumah tangga per kapita adalah *saving behavior* dari masyarakat tidak berubah dan pangsa kredit di dalam pengeluaran tidak berubah.
- c. *Human Development Index*.
Asumsi semakin baik pembangunan di wilayah, maka semakin tinggi HDInya.
- d. Kontribusi sektoral terhadap PDRB.
Kontribusi sektoral terhadap PDRB dapat dihitung melalui angka distribusi persentase PDRB baik berdasarkan harga yang berlaku maupun berdasarkan harga konstan.
- e. Struktur Fiskal.
Daerah yang tingkat pembangunannya tinggi, dilihat dari pendapatan riil perkapita yang tinggi, penerimaan pemerintah daerah tersebut (PAD asli) juga tinggi.

Selain itu menurut Tambunan (2001), distribusi pendapatan akan naik sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisasi. Pada akhir proses pembangunan, ketimpangan akan menurun, yakni saat sektor industri di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sektor pertanian) atau pada saat pengsa pertanian lebih kecil di dalam produksi dan penciptaan pendapatan.

1.3 INDEKS WILLIAMSON

Untuk memahami konvergensi dan divergensi dalam perkembangan suatu wilayah, Williamson mengamati tingkat kesenjangan diberbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan yang berbeda. Williamson menilai tingkat kesenjangan dengan memperkenalkan Indeks Williamson. Indeks Williamson adalah suatu indeks yang didasarkan pada ukuran penyimpangan pendapatan perkapita penduduk tiap wilayah dan pendapatan perkapita nasional. Jadi Indeks Williamson ini merupakan suatu modifikasi dari standar deviasi. Dengan demikian makin tinggi Indeks Williamson berarti kesenjangan wilayah semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Williamson maka akan semakin rendah kesenjangan di wilayah tersebut. Selanjutnya Williamson menganalisis hubungan antara kesenjangan wilayah dengan tingkat perkembangan ekonomi. Williamson menggunakan indeks ini untuk mengukur tingkat kesenjangan dari berbagai negara dengan tahun yang relatif sama. Dalam melakukan perhitungan Williamson menggunakan data PDB perkapita serta jumlah penduduk dari berbagai negara. Hasil perhitungan ini kemudian digabungkan dengan tingkat perkembangan ekonomi (berdasarkan tingkat PDB) negara-negara tersebut dari Kuznets. Berdasarkan penggabungan kedua perhitungan tersebut, Williamson menyatakan bahwa ada hubungan sistematis antara tingkat pembangunan nasional dan ketidaksamaan regional. Tingkat ketidaksamaan regional adalah sangat tinggi dalam golongan pendapatan menengah berdasarkan Kuznets, tetapi secara konsisten lebih rendah apabila kita bergerak ke tingkat pembangunan yang lebih tinggi.

Dapat dikatakan juga bahwa pada waktu tingkat perkembangan perekonomian suatu negara masih rendah, maka tingkat kesenjangan pun semakin rendah (nilai CV rendah). Nilai CV ini terus meningkat bagi negara-negara yang tingkat perkembangannya semakin tinggi. Sampai suatu saat tercapai titik balik, dimana tingkat perkembangan ekonomi negara semakin tinggi maka nilai CVnya semakin rendah. Bagi negara-negara yang telah maju ternyata nilai CVnya rendah, seperti negara-negara yang sangat belum berkembang. Apabila hubungan antara Indeks Williamson dengan perkembangan ekonomi digambarkan

dengan grafik, maka grafik tersebut akan berbentuk huruf U terbalik. (Williamson, 1975).

Menurut Williamson (1975), ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan antar wilayah, yaitu :

a. *Labor Migration* (Perpindahan Tenaga Kerja)

Perpindahan tenaga kerja antar daerah mungkin sangat selektif karena baik oleh hambatan keuangan dari pada tingkat pendapatan yang rendah atau kelambanan tradisional di masyarakat pedesaan, dan daerah non industri yang miskin. Orang-orang yang pindah mungkin ditandai sebagai orang-orang yang bersemangat dan berjiwa *entrepreneur*, terdidik dan mempunyai keterampilan dan dalam unsur-unsur produktif. Perpindahan penduduk yang selektif semacam ini akan memberikan penekanan terhadap adanya tendensi kearah terpercarnya pendapatan regional, tingkat partisipasi tenaga kerja, jika yang lain tetap, cenderung akan menguntungkan daerah yang kaya dan merugikan daerah yang miskin. Lebih dari itu, *human capital* yang berharga cenderung mengalir keluar dari daerah miskin ke daerah kaya yang membuat sumber-sumber regional perkapita yang dimiliki akan lebih pincang dan ketidaksamaan akan lebih besar.

b. *Capital Migration* (Perpindahan Modal)

Perpindahan modal swasta secara inter-regional cenderung berakibat buruk. Faedah eksternal ekonomis dan faedah umum yang berasal dari aglomerasi dari proyek-proyek modal di daerah kaya yang menyebabkan berpindahnya modal dari daerah miskin, hal ini cenderung memperjelas ketidaksamaan regional dan memperluas perpecahan antar daerah kaya dan daerah miskin. Resiko yang tinggi, kekurangan kemampuan

entrepreneur, dan pasar modal yang belum berkembang boleh jadi akan menekan kegiatan investasi dan akumulasi modal di daerah miskin.

c. *Central Government Policy* (Kebijakan Pemerintah Pusat)

Pemerintah pusat secara terang-terangan ataupun tidak melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan nasional yang menimbulkan peningkatan ketidaksamaan regional. Jika keadaan politik di wilayah yang miskin kurang memuaskan maka pemerintah pusat dapat saja mengalihkan investasi dari daerah miskin ke daerah kaya. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan yang semakin besar. Tetapi apabila pemerintah pusat cenderung berlaku adil maka kebijaksanaannya dapat mengurangi kesenjangan ini. Dengan memperhatikan pola investasi regional pemerintah pusat, hendaknya jelas bahwa setelah pembangunan berlangsung, maka investasi pemerintah diharapkan semakin berkurang, dan dalam banyak hal investasi pemerintah akan dibiayai oleh investasi sebelumnya.

d. *Interregional Linkages* (Keterkaitan antar Daerah)

Secara umum dapat dikatakan bahwa pada permulaan pembangunan mungkin efek menyebar dari perubahan teknologi dan perubahan sosial serta pengandaan pendapatan adalah kecil., tetapi selanjutnya diharapkan pada saat pembangunan telah berjalan, peningkatan disuatu daerah akan memberikan efek yang menyebar ke daerah di sekitarnya.

2.4. KEPENDUDUKAN

Dalam Susanti (1995), Tingkat pertumbuhan penduduk di suatu negara atau wilayah, pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh angka kelahiran, kematian, dan migrasi yang terjadi di negara/wilayah tersebut. Dalam demografi dikenal istilah transisi demografis. Istilah ini mengacu pada suatu proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian tinggi ke keadaan dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah. Dalam proses transisi demografi, periode perubahan dibagi atas empat tahap. *Tahap Pertama*, adalah periode dimana tingkat kelahiran dan tingkat kematian keduanya sama-sama tinggi. Pada *tahap kedua*, karena adanya perbaikan dalam fasilitas kesehatan, tingkat kematian menurun. Namun penurunan yang terjadi pada tingkat kematian ini tidak disertai dengan penurunan tingkat kelahiran, akibatnya pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk sangat tinggi. Pada *tahap ketiga*, penurunan tingkat kematian diikuti dengan penurunan tingkat kelahiran. Penurunan pada tingkat kelahiran ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain perubahan pola berpikir masyarakat akibat pendidikan yang diperolehnya dan juga disebabkan oleh perubahan pada aspek sosial ekonomi. Pada tahap ini tingkat pertumbuhan penduduk mulai menurun. Pada tahap akhir proses transisi ini baik tingkat kelahiran maupun tingkat kematian sudah tidak banyak berubah lagi. Angka kelahiran dan kematian yang secara alamiah memang harus terjadi. Akibatnya jumlah penduduk juga cenderung untuk tidak banyak berubah.

Apabila proses transisi demografi dikaitkan dengan proses peningkatan pendapatan perkapita, maka pada awal proses pembangunan peningkatan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan penurunan angka kematian yang begitu cepat daripada penurunan angka kelahiran. Penurunan angka kematian yang cepat ini disebabkan oleh membaiknya gizi masyarakat akibat dari pertumbuhan pendapatan masyarakat. Selain itu peningkatan pendapatan masyarakat ini juga akan menyebabkan penerimaan pajak pemerintah meningkat, dan hal ini tentu saja memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan pengeluarannya di bidang kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pada tahap awal pembangunan, pertumbuhan pendapatan perkapita biasanya diikuti dengan

tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, akibat lain dari penurunan angka kematian yang lebih cepat daripada penurunan angka kelahiran adalah tingginya jumlah penduduk usia muda dan usia tua pada struktur penduduk menurut umur, akibat dari hal ini adalah jumlah penduduk yang hidupnya ditanggung oleh penduduk usia kerja menjadi semakin tinggi. Dengan semakin meningkatnya pendapatan perkapita, perubahan pada aspek sosial-ekonomi dan dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kelahiran juga akan turun dengan cepat. Sehingga tingkat pertumbuhan penduduk menurun dan dengan sendirinya jumlah penduduk yang menjadi tanggungan penduduk usia kerja akan menurun.

2.5. KETENAGAKERJAAN

Yang dimaksudkan dengan angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Untuk menentukan angkatan kerja diperlukan dua informasi, yaitu (i) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan (ii) jumlah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan tidak ingin bekerja (contohnya adalah pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan penganggur sukarela lain). Jumlah penduduk dalam golongan (i) dinamakan penduduk usia kerja dan penduduk dalam golongan (ii) dinamakan bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja dalam suatu periode tertentu dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk dalam (i) dari jumlah penduduk dalam (ii). Perbandingan di antara angkatan kerja dengan penduduk usia kerja (dan dinyatakan dalam persen) dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja. Dalam prakteknya suatu negara dianggap sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (atau kesempatan kerja penuh) apabila dalam perekonomian tingkat penganggurannya adalah kurang dari 4% .

Sedangkan menurut Tambunan(1996), tenaga kerja adalah bagian dari penduduk (usia kerja), baik yang bekerja maupun yang kerja, yang masih mau dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Besarnya pertumbuhan angkatan kerja setiap tahun sangat tergantung pada besarnya pertumbuhan penduduk secara kumulatif

setiap tahun. Angkatan kerja adalah penduduk yang berdasarkan usia sudah bisa bekerja. Menurut Subri (2003), Tenaga kerja adalah usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Masalah yang biasa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja dan penawaran tenaga kerja, pada suatu tingkat upah. Ketidakseimbangan itu dapat berupa lebih besarnya penawaran di banding permintaan terhadap tenaga kerja dan lebih besarnya permintaan di banding penawaran tenaga kerja.

Sedangkan menurut Ananta (1990), tenaga kerja adalah bagian penduduk yang mampu bekerja memproduksi barang dan jasa. Perserikatan Bangsa-bangsa menggolongkan penduduk usia 15-64 tahun sebagai tenaga kerja. Indonesia menggolongkan penduduk usia 10 tahun ke atas sebagai tenaga kerja, dengan alasan terdapat banyak penduduk usia 10-14 dan 65 tahun ke atas yang berkerja. Angkatan kerja adalah bagian tenaga kerja yang benar-benar mau bekerja memproduksi barang dan jasa. Di Indonesia angkatan kerja adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang benar-benar mau bekerja. Mereka yang mau bekerja ini terdiri dari yang benar-benar beerja dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan.

2.6 PEMILIHAN VARIABEL PENELITIAN

Kondisi penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja di Provinsi Kalimantan Selatan tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) menunjukkan adanya penurunan, yaitu dari 73,95 persen pada tahun 2004 dan turun menjadi 71,17 persen pada tahun 2005 dan kembali turun menjadi 68,10 persen pada tahun 2006. Jika kita bandingkan dengan Provinsi Kalimantan yang lain, Provinsi Kalimantan Selatan TPAK-nya berada di urutan kedua setelah Provinsi Kalimantan Barat. Tetapi tingkat pengangguran terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, pada tahun

2006 sebesar 8,8 persen. Peningkatan pengangguran ini cukup berpengaruh kepada penyerapan tenaga kerja. Dimana penduduk usia kerja semakin bertambah, tetapi tidak diikuti oleh bertambahnya penyerapan tenaga kerja. (BPS Provinsi Kal-Sel)

Keberadaan prasarana transportasi merupakan sesuatu yang vital bagi kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam hal kegiatan ekonomi. Seperti contohnya jalan, karena jalan mempunyai keunggulan dalam hal aksesibilitas dan mobilitas. Dimana dengan adanya percepatan pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan maka akan mengurangi dan memperkecil kesenjangan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Karena disparitas merupakan salah satu hal yang penting di dalam pembangunan selain kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi. Adanya kesenjangan jalan antar wilayah merupakan akibat antara berkembangnya aktifitas-aktifitas di wilayah tersebut tetapi tidak diikuti oleh pengembangan prasarana jaringan jalan. Sehingga wilayah tersebut tidak dapat berkembang dari pada daerah disekitarnya. Sehingga ketersediaan jalan merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan.

Dalam Todaro (2000) ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia. Dimana investasi harus dilengkapi dengan investasi penunjang atau investasi infrastruktur seperti pembangunan jalan, penyediaan listrik, penyediaan air bersih dan perbaikan sanitasi, pembangunan fasilitas komunikasi, dan sebagainya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang dan mengintegrasikan segenap aktivitas ekonomi produktif. Faktor kedua adalah pertumbuhan penduduk yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja. Dan terakhir adalah kemajuan teknologi.

Menurut Tambunan (2001), bahwa dengan semakin baik pembangunan, maka semakin tinggi indeks pembangunan manusianya dan berkurangnya kesenjangan. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan berada

di peringkat 26 dari 33 Provinsi di Indonesia. Dimana pada tahun 2008 nilai IPM sebesar 68,72, sedangkan IPM Indonesia adalah 71,17. Artinya IPM Provinsi Kalimantan Selatan berada dibawah rata-rata IPM di Indonesia. Padahal Provinsi Kalimantan Selatan bukan Provinsi miskin, dan daerah yang berada di atas peringkat itu bukanlah daerah yang memiliki sumber daya alam. Banyak sumber daya alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan seperti batu bara, emas, biji besi, karet, kelapa sawit, dll. Sehingga rendahnya IPM ini dapat menimbulkan tingkat kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Dengan menggunakan data antar negara dan data sejumlah observasi runtun waktu di negara, Simon Kuznets menemukan korelasi antara ketimpangan pendapatan dan tingkat pendapatan perkapita berbentuk U terbalik. Hipotesa yang dikemukakan adalah bahwa distribusi pendapatan yang tidak merata meningkat pada awalnya dan kemudian menurun sesuai dengan berjalannya pembangunan. Kemudian lebih lanjut dijelaskan Kuznets dalam Tambunan (2001), bahwa pada awal suatu proses pembangunan ekonomi nasional, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antar provinsi mengakibatkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan antar provinsi. Tetapi dalam jangka panjang, pada saat kondisi ekonomi mencapai tingkat kedewasaan dan dengan asumsi pasar bebas dan mobilitas semua faktor-faktor produksi antar provinsi cenderung mengecil bersamaan dengan tingkat pendapatan perkapita rata-rata yang semakin tinggi setiap provinsi, yang akhirnya dapat mengurangi kesenjangan ekonomi.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesenjangan masyarakat suatu daerah adalah pendapatan perkapita. Dimana semakin tinggi pendapatan perkapita suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan mereka juga meningkat. Jika kita lihat tabel 2.1 berdasarkan data PDRB tahun 2005 dengan Harga Konstan, menggambarkan bahwa Provinsi DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi senilai 295.270.547,00 (Juta Rupiah). Kemudian diikuti oleh Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Jawa Barat. Terlihat bahwa Pulau Jawa mendominasi dari hasil PDRB yang ada di Indonesia. Sedangkan tiga Provinsi terendah adalah Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi

Gorontalo. Dimana PDRB Provinsi Gorontalo sebesar 2.027.722,84 (Juta Rupiah). Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan berada di Urutan ke 16.

Tabel 2.1
PDRB Provinsi di Indonesia Tahun 2005
Harga Konstan 2000
(Juta Rupiah)

No	Provinsi	2005
1	DKI Jakarta	295,270,547.00
2	Jawa Timur	256,442,606.28
3	Jawa Barat	242,883,881.74
4	Jawa Tengah	143,051,213.88
5	Kalimantan Timur	93,938,002.00
6	Sumatera Utara	87,897,791.21
7	Riau	79,287,586.75
8	Banten	58,106,948.22
9	Sumatera Selatan	49,633,536.00
10	Sulawesi Selatan	36,421,787.37
11	Nanggroe Aceh Darussalam	36,287,915.29
12	Kepulauan Riau	30,381,500.21
13	Lampung	29,397,248.40
14	Sumatera Barat	29,159,480.53
15	Kalimantan Barat	23,538,350.41
16	Kalimantan Selatan	23,292,544.50
17	Papua	22,209,192.69
18	Bali	21,072,444.79
19	DI. Yogyakarta	16,910,876.87
20	Nusa Tenggara Barat	15,183,788.94
21	Kalimantan Tengah	14,034,632.14
22	Sulawesi Utara	12,744,549.77
23	Jambi	12,619,972.18
24	Sulawesi Tengah	11,752,235.68
25	Nusa Tenggara Timur	9,867,308.52
26	Kepulauan Bangka Belitung	8,707,309.00
27	Sulawesi Tenggara	8,026,856.22
28	Bengkulu	6,239,361.00
29	Papua Barat	5,307,329.12
30	Maluku	3,259,244.35
31	Sulawesi Barat	3,120,765.24

32	Maluku Utara	2,236,803.64
33	Gorontalo	2,027,722.84

Sumber : BPS

Berdasarkan data BPS tentang PDRB per kapita dengan Harga Konstan pada Tahun 2005, ternyata Provinsi DKI Jakarta PDRB per kapitanya berada di urutan teratas sebesar Rp.33.324.814, disusul oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kepulauan Riau. Tingginya PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta karena merupakan pusat pemerintahan dan jantung perekonomian dimana banyak faktor yang menunjang perekonomian di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kepulauan Riau memiliki PDRB per kapita yang tinggi, karena didukung oleh sumber daya alam yang melimpah. Untuk Provinsi terendah ditempati oleh Provinsi Gorontalo sebesar Rp. 2.198.845. Provinsi Kalimantan Selatan untuk nilai PDRB per kapita berada di urutan ke 11. Tetapi nilai PDRB per kapita ini, lebih banyak didukung oleh Kabupaten/Kotamadya yang ternyata mempunyai sumber daya alam yang melimpah.

Tabel 2.2

PDRB Per Kapita Provinsi di Indonesia Tahun 2005

No	Provinsi	Tahun 2005
1	DKI Jakarta	33324814
2	Kalimantan Timur	32974610
3	Kep. Riau	23831469
4	Riau	17314653
5	Papua	11842452
6	Aceh	9000896
7	Kep. Bangka Belitung	8344682
8	Papua Barat	8253857
9	Kalimantan Tengah	7329172
10	Sumatra Selatan	7318056
11	Kalimantan Selatan	7097073
12	Jawa Timur	7065648
13	Sumatra Utara	7059547
14	Banten	6435722
15	Sumatra Barat	6386044
16	Jawa Barat	6233315

17	Bali	6227869
18	Sulawesi Utara	5986785
19	Kalimantan Barat	5808575
20	Sulawesi Tengah	5121154
21	DI Yogyakarta	5057608
22	Sulawesi Selatan	4849963
23	Jambi	4787604
24	Jawa Tengah	4473430
25	Lampung	4131045
26	Sulawesi Tenggara	4089024
27	Bengkulu	4027283
28	NTB	3628656
29	Sulawesi Barat	3219179
30	Maluku	2604189
31	Maluku Utara	2529914
32	NTT	2316110
33	Gorontalo	2198845

Sumber : BPS

2.7 PENELITIAN SEBELUMNYA

Penelitian yang dilakukan oleh Khusaini (2004), melakukan studi analisis untuk mengukur dan mengetahui kesenjangan pendapatan antar daerah kabupaten/kota yang dan mengetahui pengaruh kesenjangan pendapatan antar daerah terhadap pertumbuhan ekonomi regional, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional tersebut dengan kurun waktu penelitian tahun 1993-2003. Estimasi yang dilakukan secara keseluruhan kabupaten/kota dan pengelompokkan data Banten Utara dan Banten Selatan. Nilai indeks Williamson terendah terdapat di kota tangerang (0,0999) pada tahun 2002 dan tertinggi terdapat di kota Cilegon (0,4465) pada tahun 2003. Sedangkan untuk mengetahui dampak kesenjangan dan variabel lain terhadap pertumbuhan regional digunakan model regresi persamaan tunggal. Dimana hasilnya menunjukkan bahwa aglomerasi, kapital, tenaga kerja, dan variabel dummy provinsi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Dan hasil estimasi pengelompokkan sample dengan menghilangkan variabel dummy provinsi menunjukkan seluruh variabel berdampak positif pada pertumbuhan

ekonomi regional dan signifikan secara statistik. Tetapi variabel tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan tidak signifikan secara statistik.

Sedangkan penelitian Syateri (2005) berbeda dengan Khusaini, dimana meneliti tentang tingkat kesenjangan antar daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan mengetahui hubungan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu serta dampak faktor-faktor tersebut terhadap tingkat kesenjangan. Data yang digunakan dalam kurun waktu periode 1983-2003. Perhitungan tingkat kesenjangan dilakukan dengan indeks Williamson dan menggunakan model regresi linier berganda untuk mengetahui hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesenjangan di Provinsi Bengkulu. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pada periode 1983-2003 berfluktuatif dan semakin menurun. Nilai terendah terjadi pada tahun 1999 (0,16) dan tertinggi pada tahun 1984 (0,49). Sedangkan untuk hasil estimasi dengan regresi didapatkan bahwa variabel PMTDB dan tenaga kerja memiliki hubungan yang negatif, sedangkan variabel sumbangan dari pemerintah pusat memiliki hubungan yang positif dan signifikan secara statistik.

Gama melakukan penelitian tentang disparitas dan konvergensi PDRB per Kapita antar Kabupaten/Kota di Provinsi Bali selama kurun waktu 1993-2006 dimana penelitian tersebut menghasilkan bahwa terjadi ketimpangan yang cukup tinggi di Provinsi Bali. Dimana angka Indeks Williamson semakin mendekati angka satu pada tahun 2006. PDRB per kapita Provinsi Bali tidak mengalami konvergensi jika dilihat dari tingkat dispersi PDRB per kapita 9 kabupaten/kota yang terus meningkat dan konvergensi bruto yang tidak terjadi pada PDRB per kapita 9 kabupaten/kota di Provinsi Bali.

Akita dan Lukman (1995), melihat ketimpangan antar daerah di Indonesia. Dimana didalam penelitian terjadi penurunan kesenjangan dari tahun 1975-1992. Disimpulkan bahwa penurunan ini diakibatkan dengan berkurangnya minyak dan gas dalam PDB ataupun PDRB. Ternyata kontribusi sektor tersier terhadap ketimpangan daerah telah berkurang, tetapi kontribusi sektor sekunder malah

meningkat. Penelitian yang dilakukan Suardika (2002), mengenai disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah tingkat II di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 1985-1999 menemukan bahwa tingkat disparitas yang terjadi semakin meningkat yaitu sebesar 0,016514. Kemudian faktor-faktor yang berpengaruh terhadap disparitas pembangunan ekonomi adalah realisasi pembangunan daerah tingkat II dan pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif, sedangkan panjang jalan ternyata berpengaruh negatif. Alat analisis yang digunakan yaitu menggunakan indeks williamson untuk mengukur tingkat disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah. Kemudian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang penyebab disparitas diuji dengan regresi. Sedangkan untuk menganalisis tipologi daerah digunakan *Klassen Typologi* (Tipologi Klasen).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ardika, meneliti tentang tingkat kesenjangan pendapatan perkapita antar daerah kab/kota di Provinsi Bali, mengetahui karakteristik daerah berdasarkan pola pertumbuhan, mengetahui pengaruh pertumbuhan provinsi, spesialisasi, dan pertumbuhan internal masing-masing sektor, mengetahui sektor basis dan non basis, mengetahui struktur ekonomi daerah, mengetahui perbedaan rata-rata kontribusi dua sektor yaitu perdagangan, hotel dan restoran, dan pertanian. Dan juga ingin mengathui variasi keragaman rata-rata pengeluaran pembangunan antar daerah. Penulis ini menggunakan alat analisis Indeks Williamson, *Klassen Typology*, *Shift Share Location Quotient*, Kontribusi per sektor, Uji *Variance*, dan Koefisien Theil. Data yang digunakan adalah data sekunder runtun waktu tahun 1994-1999. Hasil yang didapatkan dengan menggunakan indeks Williamson, angka kesenjangan di Provinsi Bali selama periode penelitian relatif masih terjadi kesenjangan. Dampak dari kesenjangan pendapatan tersebut digunakan alat analisis Tipologi Klasen. Dimana kategori daerahnya di bagi menjadi 3, yaitu daerah maju dan cepat tumbuh, daerah berkembang cepat, dan daerah tertinggal.

Jika dilihat dari analisis *Shift Share*, untuk kabupaten yang masuk dalam kategori daerah maju dan cepat tumbuh terlihat jika pengaruh pertumbuhan provinsi, spesialisasi, dan pertumbuhan internal terbesar berada di sektor perdagangan, hotel dan restoran, begitu juga untuk daerah yang masuk kategori

daerah berkembang cepat hanya berbeda pada spesialisasinya saja yaitu terbesar di sektor industri pengolahan, sedangkan daerah kategori tertinggal memiliki pengaruh pertumbuhan provinsi, spesialisasi dan pertumbuhan internal terbesar di sektor pertanian, bahkan ada daerah yang seluruh sektornya tidak memiliki pertumbuhan internal. Dari analisis LQ dan kontribusi persektor, maka daerah kab/kota yang memiliki sektor basis dan kontribusi terbesar di sektor perdagangan hotel dan restoran maka daerah itu dikategorikan daerah maju dan cepat tumbuh serta daerah berkembang. Jika sektor perdagangan hotel dan restoran bukan sektor basis atau karena sektor pertaniannya merupakan sektor basis, maka daerah tersebut dikategorikan daerah tertinggal.

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2006), meneliti tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kesenjangan regional di Indonesia dengan memakai data panel. Wahyu membuat empat model yang menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga mempengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi. Hasil estimasi menunjukkan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu PDRB per kapita, jumlah penduduk, dan rasio panjang jalan. Sedangkan dua variabel lain yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan yang negatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Soebagyo (2000) tentang disparitas pembangunan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya studi kasus di daerah Sumbagsel, ketimpangan yang terjadi relatif rendah, dimana angka Indeks Williamsonnya yang mendekati angka 0. Ini menunjukkan adanya pemerataan pembangunan di daerah Sumbagsel. Kemudian dengan melakukan uji regresi menyatakan bahwa faktor tingkat pengeluaran pemerintah, tingkat pertumbuhan dan sektor pajak ternyata relatif sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat pembangunan di Sumbagsel.